

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS SUMBER DAYA AIR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor SOP	:	1148 tahun 2025				
Tanggal Pembuatan	:	12 September 2025				
Tanggal Revisi	:					
Tanggal Efektif	:					
Disah kan oleh	:	PROVINS/ KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINS/ DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA IKA AGUSTIN NINGRUM NIP 198208012006042013				
Nama/Judul SOP : Standar Operasional Prosedur (SOP) Keberatan Informasi Publik						

Dasar Hukum:

- 1. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
- Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana.

Kualifikasi Pelaksana:

Petugas Informasi memiliki kemampuan:

- a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
- b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
- Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Keterkaitan:

Sop ini terkait dengan:

- 1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik
- 2. SOP Dokumentasi dan Pengarsipan
- 3. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
- 4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan;

- 1. Desk (meja) layanan Informasi
- 2. Komputer
- 3. Printer
- Internet
- Surat elektronik
- 6. Telephone dan fax
- 7. Surat/nota dinas
- Daftar Informasi Publik
- 9. Surat Keputusan Daftar Informasi Publik

Peringatan:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan ini tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor : 114 6 Tahun 2015 Tanggal : 12 September 2025

Standar Operasional Prosedur (SOP) Keberatan Informasi Publik

						MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	PELAKSANA SEKSI PELAYANAN SEKSI PELAYANAN DAN DORUMEN		SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	RMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentusi Pelaksana dengan alasan yang tertera di pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi	PEMOHON		DAN DURUMEN LASI PELANGHAN		Formulir Permohonan Informasi Publik. Formulir pengajuan keberatan informasi	Pada hari Kerja dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan informasi	
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana Dinas Sumber Daya Provinsi DKI Jakarta					Formulir pengajuan keberatan informasi	Kerja dan	Formulir pengajuan keberatan informasi dan berks Berkas kelengkapan pemohon informasi	
3	Menganalisa, memeriksa dan mengkonsepkan pengajuan keberatan informasi/dokumen sebagai jawaban tanggapan keberatan informasi.					Daftar Informasi publik Surut Keberatan Informasi Notulensi Rapat Nota Dinas	Pada hari Kerja dan jam kerja	Informasi/ Dokumen	
4	Menyampaikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi ke pemohon					Informasi/Dokumen Surat Keberatan Informasi	Pada hari Kerja dan jam kerja	Disposisi	
5	Pemohon informasi menerima surat jawaban permohonan informasi yang diajukan					Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik yang diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	Pada hari Kerja dan jam kerja	Tanda terima dan Arsip	

Ditetapkan di Jakarta
padi kanggal September 2025
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA